

**RANCANGAN AKHIR**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA(RENJA)**  
**SEMESTA BERENCANA**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI**  
**TAHUN 2021**



**2021**



## KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan Sesanti Angayubagia terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2021 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali ini adalah untuk dapat memberikan panduan dan informasi kepada semua pihak yang terkait dengan keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2021 dalam rangka pembangunan di sector perikanan dalam arti luas dan untuk meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan produksi, nilai tambah dan kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan yang pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.

Demikian semoga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perikanan pada tahun 2021.

Bali, 20 September 2021

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Bali

Ir. I Made Sudarsana, M.Si

---

Pembina Utama Muda

NIP. 19650810 199203 1 017



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penyusunan Renja .....	7
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN     PROVINSI BALI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN .....</b>	<b>9</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Triwulan II Tahun Berkenaan.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali .....	33
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>37</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	37
3.3 Progran Dan Kegiatan.....	38
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN     PERIKANAN PROVINSI BALI .....</b>	<b>42</b>
<b>BABV PENUTUP .....</b>	<b>43</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan disektor Kelautan dan Perikanan memiliki peranan yang sangat strategis terhadap pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi, pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemberdayaan masyarakat pesisir, penyerapan tenaga kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan konsumsi ikan, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, maka *strategi pembangunan kelautan dan perikanan* yang ditempuh adalah Optimalisasi pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan dengan tetap terjaga kelestariannya, Pemberdayaan masyarakat, Penguatan modal, Pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan serta penyediaan benih/induk berkualitas dan Modernisasi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan

Untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan ke depan lebih ditekankan pada pengendalian perikanan tangkap, pengembangan budidaya perikanan dan peningkatan nilai tambah melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk yang mengarah pada pengembangan industri kelautan dan perikanan yang terpadu berbasis masyarakat.

Untuk itu, kebijakan operasional pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan adalah Pengembangan komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan, Meningkatkan pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan, Meningkatkan lapangan kerja, ekspor, konsumsi ikan perkapita dan kesejahteraan masyarakat, Meningkatkan kerja sama penelitian dan pengelolaan potensi laut, dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh.

Dalam pasal 11 disebutkan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat; selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan Rencana Perangkat Daerah, terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Sementara dalam pasal 1 ayat 30 Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rancangan Akhir Renja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dalam jangka waktu satu tahun yaitu tahun 2021. Rancangan Akhir Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2021 diajukan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Provinsi Bali tahun 2021 dan setelah penetapan RKPD Provinsi Bali tahun 2021, Rancangan Akhir Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2021 diverifikasi oleh Bappeda Litbang Provinsi Bali selanjutnya diajukan untuk mendapat pengesahan dari Gubernur Bali.

Proses penyusunan Rancang Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2021 didasarkan pada Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2018-2023. Renja didasarkan pada Rancangan Akhir Teknokratik RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 serta hasil evaluasi RPJMD Provinsi Bali 2013-2018. Konsekuensi logis dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali 2018-2023, maka penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2021, wajib mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

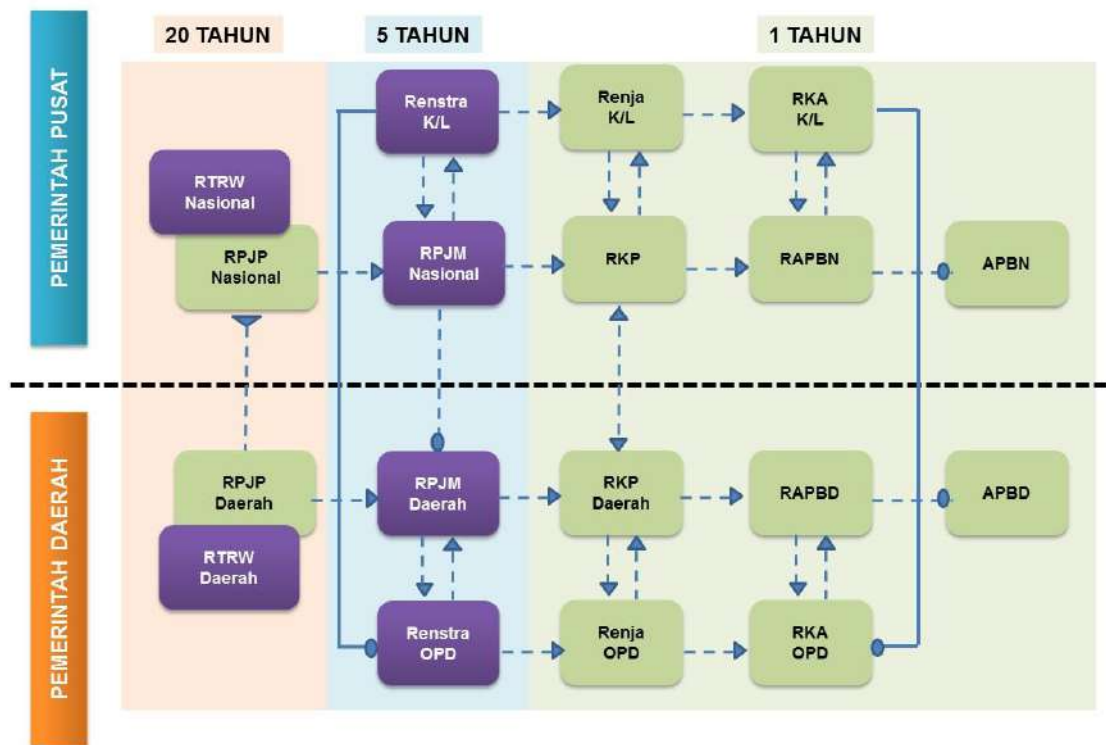
Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2021 didasarkan pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 2636 Tahun 2021 Tanggal 15 September 2021 tentang Penyampaian Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 Sebagai Pedoman Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2021 diawali dengan mengajukan Rancangan Akhir keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, selanjutnya orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Penyusunan Rancangan Akhir keputusan Kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renja Perangkat Daerah diajukan melalui Bappeda Provinsi Bali. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah dilakukan secara internal pada Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bali dengan mengundang Bappeda Provinsi Bali dengan materi orientasi meliputi tugas pokok dan fungsi Tim Penyusun Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2021, penyamaan persepsi tentang tata cara penyusunan Renja Perangkat

daerah dan kesiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD), Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

**Diagram 1.1**

Hubungan Dokumen Renja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dengan,Dokumen,Perencanaan Lainnya



Mengacu pada gambar diatas dapat dijelaskan secara rinci hubungan dokumen Renja PD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Renja PD mengacu pada perubahan RKPD sebagai dampak adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi, dengan mengacu pada Rensra PD, Renja PD dan KUPA/PPAS menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD, selanjutnya akan menjadi acuan DPA PD, yang merupakan penjabaran dari APBD.

### 1.2 Landasan hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2021 adalah :



- 1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 7) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;



- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 97 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4664).
- 18) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- 19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 21) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
- 22) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi





- Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 26) Peraturan Daerah Provinsi nomor 6 Tahun 2009 tentang rancana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 nomor 6 tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali nomor 6)
  - 27) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
  - 28) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
  - 29) Peraturan Gubernur Bali Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali.
  - 30) Peraturan Gubernur Bali Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana teknis di lingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali.
  - 31) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
  - 32) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
  - 33) Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020.

### **1.3 Maksud dan Tujuan.**

Sebagaimana diuraikan di Atas bahwa maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2021 adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 khususnya Rencana Kerja Tahun 2021 serta sebagai bahan masukan pada penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2021 dan setelah RKPD Perubahan ditetapkan, maka Renja



Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali 2021 akan disesuaikan pada RKPD Perubahan tersebut.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2021 adalah :

- 1) Menjabarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 terutama pada tahun 2021.
- 2) Merancang program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2021
- 3) Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2021 dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018-2023
- 4) Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2021 dengan RKPD tahun 2022

#### **1.4 Sistematika Penyusunan Renja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2021**

Sistematika Penyusunan Renja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2021 disusun sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I diuraikan tentang pengertian Renja, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Pada Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Sistematika Penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali; Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

BAB II. Tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun Berkenaan berisi : 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Triwulan II Tahun Berkenaan dan capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 3) Review terhadap Rancangan Akhir RKPD, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI**

Pada Bab III Renja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, dan 3) Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI**

Bab IV. Renja Perangkat Daerah; diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

### **BAB V PENUTUP**

Bab V Penutup; Pada bab ini diuraikan antara lain : Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Dalam BAB II; Tentang Hasil Evaluasi Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Triwulan II Tahun Berkenaan : 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 3) Review terhadap Rancangan Akhir RKPDP, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**



Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali pada tahun 2021 melaksanakan urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan . Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Urusan Kelautan dan Perikanan merupakan Urusan Pilihan; dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka Urusan Kelautan dan Perikanan tetap dinyatakan sebagai Urusan Pilihan.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan

Tugas Pokok Dinas adalah:

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Fungsi Dinas adalah :

1. *Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi.*
2. *Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi.*
3. *Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang kelautan dan perikanan*
4. *Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan*
5. *Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya..*

Berdasarkan data tahun 2020, komposisi kepegawaian Dinas Kelautan dan Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

**Tabel.2.1.1**

**Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	19
3	Strata 1	52
4	Diploma IV	-



5	Diploma III	1
6	Diploma II	-
7	SLTA / Sederajat	46
8	SLTP / Sederajat	1
9	SD	4
<b>Total</b>		<b>123</b>

Tabel.2.1.2

## Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	21
2	Golongan III	72
3	Golongan II	27
4	Golongan I	3
<b>Total</b>		<b>123</b>

Tabel.2.1.3

## Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	8
3	Eselon IV	15
4	Fungsional	99
<b>Total</b>		<b>123</b>

Tabel.2.1.4

## Aset Pada Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan

NO	URAIAN ASET/MODAL	UKURAN
1	Tanah	734,578 M <sup>2</sup>



2	Gedung dan Bangunan (Buah/Unit)	17 Unit
3	Station Wagon	10
4	Pick Up	2
5	Sepeda Motor	16
6	Speed Boat	-
7	Perahu Ketek	-
8	Sepeda motor R3	-
9	Eskavator	-
10	Barang lainnya (Buah/Unit)	398 Unit

Pada tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam upaya mewujudkan visi dan misi Provinsi Bali dalam Urusan Kelautan dan Perikanan melaksanakan 6 Program, 15 Kegiatan, dan 74 Sub Kegiatan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2021 sebagai hasil pelaksanaan Renstra tahun keempat akan diuraikan secara detail berikut ini:



Tabel 2.1.5

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2021

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>			<b>8</b>		<b>9 = (8/7) x 100%</b>	
<b>Dinas</b>										
	3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78%	persen	13.365.939.824,00	25%	5.557.542.603,00	32,05%	41,58%
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78%	persen	1.800.000,00	25%	-	32,05%	0,00%
	3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen	1	dokumen	-	0	-	0,00%	0,00%
	3.25.01.1.01.03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	-	0	-	0,00%	0,00%
	3.25.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKOD	1	dokumen	-	0	-	0,00%	0,00%
	3.25.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	-	0	-	0,00%	0,00%
	3.25.01.1.01.07	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	dokumen	1.800.000,00	0	-	0,00%	0,00%



	<b>3.25.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai evaluasi manajemen kinerja</b>	<b>78%</b>	<b>persen</b>	<b>11.503.379.138,00</b>	<b>25%</b>	<b>4.890.588.007,00</b>	<b>32,05%</b>	<b>42,51%</b>
	3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	52	dokumen	11.503.379.138,00	29	4.890.588.007,00	55,77%	42,51%
	<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai evaluasi manajemen kinerja</b>	<b>78%</b>	<b>persen</b>	<b>167.630.210,00</b>	<b>25%</b>	<b>84.950.055,00</b>	<b>32,05%</b>	<b>50,68%</b>
	3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1	tahun	23.627.210,00	0,5	23.516.630,00	50,00%	99,53%
	3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	1	tahun	75.000.000,00	0,5	32.444.000,00	50,00%	43,26%
	3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1	tahun	16.653.000,00	0,5	6.890.675,00	50,00%	41,38%
	3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1 Tahun	1	tahun	52.350.000,00	0,5	22.098.750,00	50,00%	42,21%
	<b>3.25.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Nilai evaluasi manajemen kinerja</b>	<b>78%</b>	<b>persen</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>25%</b>	<b>625.000,00</b>	<b>32,05%</b>	<b>0,64%</b>
	3.25.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	1	tahun	97.000.000,00	0,5	625.000,00	50,00%	0,64%
	<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai evaluasi manajemen kinerja</b>	<b>78%</b>	<b>persen</b>	<b>119.365.076,00</b>	<b>25%</b>	<b>55.277.133,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>46,31%</b>
	3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyura	1	tahun	3.000.000,00	1	3.000.000,00	100,00%	100,00%
	3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	1	tahun	116.365.076,00	0,5	52.277.133,00	50,00%	44,93%





3.25.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1	Tahun	1.476.765.400,00	0,5	526.102.408,00	50,00%	35,63%
3.25.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	1	tahun	537.702.984,00	0,5	256.204.226,00	50,00%	47,65%
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	1	tahun	691.512.416,00	0,5	231.762.382,00	50,00%	33,52%
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dinas secara rutin/berkala	1	tahun	247.550.000,00	0,5	38.135.800,00	50,00%	15,41%
<b>3.25.02</b>	<b>Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan</b>	1	Kawasan	148.570.396,00	0,13	31.859.682,00	13,00%	21,44%
		Jumlah kawasan WP3K yang meningkat kualitasnya	5	Kawasan		1		20,00%	
3.25.02.1.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan</b>	1	kawasan	98.958.648,00	0,13	18.055.866,00	13,00%	18,25%
3.25.02.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali	1	kawasan	78.958.648,00	0,15	14.844.816,00	15,00%	18,80%



3.25.02.1.01.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat.	Terlaksananya kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	5	kawasan	20.000.000,00	0,2	3.211.050,00	4,00%	16,06%
<b>3.25.02.1.02</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 1 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>Jumlah kawasan WP3K yang meningkat kualitasnya</b>	<b>5</b>	<b>kawasan</b>	<b>49.611.748,00</b>	<b>1</b>	<b>13.803.816,00</b>	<b>20,00%</b>	<b>27,82%</b>
3.25.02.1.02.02	Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pelaku usaha yang memahami izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	5	kawasan	49.611.748,00	1	13.803.816,00	20,00%	27,82%
<b>3.25.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Jumlah produksi perikanan tangkap</b>	<b>101.082,74</b>	<b>ton</b>	<b>168.246.768,00</b>	<b>26.022,00</b>	<b>18.048.120,00</b>	<b>25,74%</b>	<b>10,73%</b>
<b>3.25.03.1.01</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap</b>	<b>101.082,74</b>	<b>ton</b>	<b>168.246.768,00</b>	<b>26.022,00</b>	<b>18.048.120,00</b>	<b>25,74%</b>	<b>10,73%</b>
3.25.03.1.01.01	Penyediaan data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Penyusunan Data dan Informasi Sumber daya Ikan	8	kabupaten	58.331.868,00	3	18.048.120,00	37,50%	30,94%
3.25.03.1.01.03	Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Fasilitasi Pendamping LPMUKP	8	orang	109.914.900,00	3	-	37,50%	0,00%
<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>18.609,02</b>	<b>ton</b>	<b>53.031.148,00</b>	<b>4.275,00</b>	<b>13.158.816,00</b>	<b>22,97%</b>	<b>24,81%</b>
<b>3.25.04.1.05</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>18.609,02</b>	<b>ton</b>	<b>53.031.148,00</b>	<b>4.275,00</b>	<b>13.158.816,00</b>	<b>22,97%</b>	<b>24,81%</b>



	3.25.04.1.05.06	Pengelolaan kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di laut dan lintas darat	Jumlah monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan	17	kali	53.031.148,00	4	13.158.816,00	23,53%	24,81%
	<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA LAUT DAN PERIKANAN</b>	<b>Jumlah pelaku usaha taat Hukum</b>	<b>23</b>	<b>pelaku usaha</b>	<b>37.620.000,00</b>	<b>9</b>	<b>20.520.000,00</b>	<b>39,13%</b>	<b>54,55%</b>
	<b>3.25.05.1.01</b>	<b>Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 MIL</b>	<b>Jumlah Pelaku usaha taat hukum</b>	<b>23</b>	<b>pelaku usaha</b>	<b>26.220.000,00</b>	<b>8</b>	<b>15.960.000,00</b>	<b>34,78%</b>	<b>60,87%</b>
	3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Bidangh Kelautan Yang diawasi	23	pelaku usaha	17.100.000,00	8	6.840.000,00	34,78%	40,00%
	3.25.05.1.01.02	Pengawasan usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi	8	pelaku usaha	6.840.000,00	3	6.840.000,00	37,50%	100,00%
	3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang pembudidayaan Ikan di laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha perikanan Budidaya yang diawasi	2	pelaku usaha	2.280.000,00	2	2.280.000,00	100,00%	100,00%
	<b>3.25.05.1.02</b>	<b>Pengawasan Sumber daya perikanan di wilayah sungai,danau,waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/kota dalam 1 [satu] daerah provinsi</b>	<b>Jumlah pelaku usaha taat hukum</b>	<b>50</b>	<b>pelaku usaha</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>2</b>	<b>4.560.000,00</b>	<b>4,00%</b>	<b>40,00%</b>



3.25.05.1.02..03	Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 [satu] daerah provinsi	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang diawasi	10	pelaku usaha	11.400.000,00	2	4.560.000,00	20,00%	40,00%
<b>3.25.06</b>	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Jumlah produk yang bersertifikat</b>	<b>149</b>	<b>SKP</b>	<b>112.088.868,00</b>	<b>91</b>	<b>75.220.520,00</b>	<b>61,07%</b>	<b>67,11%</b>
<b>3.25.06.1.02</b>	<b>Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar</b>	<b>Jumlah produk yang bersertifikat</b>	<b>149</b>	<b>SKP</b>	<b>112.088.868,00</b>	<b>91</b>	<b>75.220.520,00</b>	<b>61,07%</b>	<b>67,11%</b>
3.25.06.1.02.01	Sub kegiatan pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Jumlah penerima paket gemarikan ; Pembinaan mutu dan nilai tambah produk olahan hasil perikanan	200	paket	112.088.868,00	115	75.220.520,00	57,50%	67,11%
			25	UPI		0		0,00%	
<b>3.25.06</b>	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Jumlah produk yang bersertifikat</b>	<b>149</b>	<b>SKP</b>	<b>26.344.800,00</b>	<b>91</b>	<b>-</b>	<b>61,07%</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.25.06.1.03</b>	<b>Kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</b>	<b>Jumlah produk yang bersertifikat</b>	<b>149</b>	<b>SKP</b>	<b>26.344.800,00</b>	<b>91</b>	<b>-</b>	<b>61,07%</b>	<b>0,00%</b>



3.25.06.1.03.01	Sub kegiatan Pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah penerima paket gemarikan ; Pembinaan mutu dan nilai tambah produk olahan hasil perikanan	100	buku	26.344.800,00	74	13.053.100,00	74,00%	49,55%	
<b>UPTD Kawasan Konservasi Perairan</b>										
<b>3.25.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>78%</b>	<b>persen</b>	<b>1.855.095.766,00</b>	<b>25%</b>	<b>656.576.898,00</b>	<b>32,05%</b>	<b>35,39%</b>	
<b>3.25.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>78%</b>	<b>persen</b>	<b>1.713.800.166,00</b>	<b>25%</b>	<b>574.147.341,00</b>	<b>32,05%</b>	<b>33,50%</b>	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM dan tunjangan ASN	52	dokumen	1.713.800.166,00	29	574.147.341,00	55,77%	33,50%	
<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan</b>	<b>1</b>	<b>kawasan</b>	<b>55.096.000,00</b>	<b>0,5</b>	<b>14.772.658,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>26,81%</b>	
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	1.050.000,00	0,9	921.000,00	90,00%	87,71%	
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	40.482.000,00	0,5	10.089.133,00	50,00%	24,92%	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	10.000.000,00	0,5	2.680.000,00	50,00%	26,80%	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	1.764.000,00	0,5	722.525,00	50,00%	40,96%	



3.25.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	1.800.000,00	0,5	360.000,00	50,00%	20,00%
3.25.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	-	0	-	0,00%	0,00%
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat konsultasi SKPD	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	-	0	-	0,00%	0,00%
<b>3.25.01.1.07</b>	<b>Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan</b>	1	kawasan	<b>5.400.000,00</b>	1	<b>5.291.000,00</b>	100,00%	<b>97,98%</b>
3.25.01.1.07.10	Pengadaan sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	1	kawasan	5.400.000,00	1	5.291.000,00	100,00%	97,98%
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		<b>1</b>	<b>kawasan</b>	<b>6.350.000,00</b>	<b>0,5</b>	<b>2.261.900,00</b>	50,00%	<b>35,62%</b>
3.25.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	JumlahKawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	450.000,00	1	450.000,00	100,00%	100,00%
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	JumlahKawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	5.900.000,00	0,5	1.811.900,00	50,00%	30,71%
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan</b>	1	kawasan	<b>74.449.600,00</b>	0,87	<b>60.103.999,00</b>	87,00%	<b>80,73%</b>
3.25.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	74.449.600,00	0,87	60.103.999,00	87,00%	80,73%



3.25.02.1	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan pulau-pulau kecil	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	1.448.614.928,00	0,32	229.475.170,00	32,00%	15,84%	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai 12 Mil Diluar minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	1.448.614.928,00	0,32	229.475.170,00	32,00%	15,84%	
3.25.02.1.01.01	Pengelolaan kawasan Konsevasi di Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	kawasan	1.448.614.928,00	0,32	229.475.170,00	32,00%	15,84%	
<b>UPTD Pelabuhan Perikanan</b>										
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78%	persen	2.217.908.394,00	25%	405.077.643,00	32,05%	18,26%	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78%	persen	2.005.681.516,00	25%	335.826.062,00	32,05%	16,74%	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	52	dokumen	2.005.681.516,00	29	672.304.686,00	55,77%	33,52%	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di Pelabuhan	78%	persen	74.023.050,00	25%	11.066.052,00	32,05%	14,95%	
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan	10	ton	2.244.400,00	5	1.305.500,00	50,00%	58,17%	



3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Pelabuhan Perikanan dan Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	80	nelayan	39.082.650,00	30	8.871.052,00	37,50%	22,70%
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan	10	ton	1.776.000,00	4	439.500,00	40,00%	24,75%
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan	10	ton	1.800.000,00	4	450.000,00	40,00%	25,00%
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan	10	ton	29.120.000,00	0	-	0,00%	0,00%
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan</b>	10	ton	<b>16.560.780,00</b>	<b>4</b>	<b>3.417.213,00</b>	40,00%	20,63%
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan	10	ton	16.560.780,00	4	3.417.213,00	40,00%	20,63%
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah kendaraan dinas dan gedung yang terpelihara</b>	10	ton	<b>121.643.048,00</b>	<b>8</b>	<b>54.768.316,00</b>	80,00%	45,02%
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan	10	ton	64.166.600,00	4	32.567.000,00	40,00%	50,75%
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan	10	ton	57.476.448,00	4	22.201.316,00	40,00%	38,63%





3.25.03.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	1	Pe;abuhan	37.476.448,00	0,23	13.158.816,00	23,00%	35,11%	
3.25.03.1.06	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	60	Nelayan	37.476.448,00	14	13.158.816,00	23,33%	35,11%	
3.25.03.1.06.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik dan Terlaksananya Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Nelayan	60	nelayan	37.476.448,00	14	13.158.816,00	23,33%	35,11%	
<b>UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan</b>										
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78%	persen	2.739.818.056,00	25%	1.020.564.854,00	32,05%	37,25%	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan	Nilai evaluasi manajemen kinerja	52	dokumen	2.092.936.862,00	29	785.554.415,00	55,77%	37,53%	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	52	dokumen	2.092.936.862,00	29	785.554.415,00	55,77%	37,53%	
3.25.01.1.06	- Administrasi Umum perangkat daerah	Jumlah ATK yg tersedia, jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan, jumlah barang cetak dan penggandaan yg tersedia	3	paket	26.902.010,00	1	6.616.550,00	33,33%	24,60%	



3.25.01.1.06.02	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah ATK yang disediakan	1	paket	3.782.010,00	1	3.008.000,00	100,00%	79,53%
		- Jumlah ATK yang disediakan	2	buah		0	-	0,00%	
		- Jumlah ATK yang disediakan	22	rim		0	-	0,00%	#DIV/0!
3.25.01.1.06.04	- Penyediaan bahan logistik kantor	- Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan	1	tahun	20.000.000,00	0,5	2.494.800,00	50,00%	12,47%
3.25.01.1.06.05	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1	paket	3.120.000,00	0,5	1.113.750,00	50,00%	35,70%
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Jumlah materai yg tersedia, jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan</b>	<b>3</b>	<b>paket</b>	<b>227.350.000,00</b>	<b>1</b>	<b>74.919.629,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>32,95%</b>
3.25.01.1.08.01	- Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia	150	lembar	750.000,00	150	750.000,00	100,00%	100,00%
3.25.01.1.08.02	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	- Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	jenis	111.600.000,00	2	31.313.868,00	66,67%	28,06%
3.25.01.1.08.04	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dan Jumlah Sistem Manajemen Mutu yang terpelihara	2	paket	115.000.000,00	1	42.855.761,00	50,00%	37,27%



3.25.01.1.09	- Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	100%	persen	392.629.184,00	40%	153.474.260,00	40,00%	39,09%
3.25.01.1.09.02	Sub kegiatan								
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	3	unit	127.050.496,00	2	48.150.140,00	66,67%	37,90%
3.25.01.1.09.06	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	16	unit	48.196.448,00	10	24.331.520,00	62,50%	50,48%
3.25.01.1.09.09	- Pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Luas Gedung Kantor yang dipelihara	150	m2	217.382.240,00	67	80.992.600,00	44,67%	37,26%
3.25.06	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Jumlah Hasil Uji yang dikeluarkan</b>	<b>4900</b>	<b>Sample</b>	<b>349.414.012,00</b>	1413	<b>183.718.650,00</b>	28,84%	<b>52,58%</b>
3.25.06.02	- Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Rekomendasi hasil uji produk perikanan, terjaganya UPI yang menerapkan persyaratan sertifikasi SNI	2	paket	349.414.012,00	1	183.718.650,00	50,00%	52,58%
3.25.06.02.01	- Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha	Jumlah produk perikanan yang diuji	4900	sampel	327.314.012,00	1413	161.618.650,00	28,84%	49,38%



		pengolah dan pemasaran skala menengah dan besar.								
3.25.06.02.02		- Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing	Jumlah UPI yang di surveillance	9	UPI	22.100.000,00	2	22.100.000,00	22,22%	100,00%
<b>UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut</b>										
<b>3.25.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>78%</b>	<b>persen</b>	<b>5.111.277.182,00</b>	<b>25%</b>	<b>1.406.319.138,00</b>	<b>32,05%</b>	<b>27,51%</b>	
<b>3.25.01.1.02</b>	<b>administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>78%</b>	<b>persen</b>	<b>4.425.032.498,00</b>	<b>25%</b>	<b>1.161.683.807,00</b>	<b>32,05%</b>	<b>26,25%</b>	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	52	dokumen	4.425.032.498,00	29	1.161.683.807,00	55,77%	26,25%	



3.25.01.1.06	Administrasi Umum perangkat Daerah	Presentase penerangan bangunan kantor yang tertangani, presentase upacara keagamaan yang tertangani, presentase pemeliharaan peralatan kantor yang tertangani dan presentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani	12	bulan	57.525.600,00	6	19.214.581,00	50,00%	33,40%
3.25.01.1.06.01	Penpenerangan Bangunan kantoryediaan Komponen instalasi listrik/	Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	3	jenis	1.434.600,00	3	1.304.181,00	100,00%	90,91%
3.25.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5	jenis	22.091.000,00	2	2.649.900,00	40,00%	12,00%
3.25.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan	12	bulan	30.000.000,00	6	14.698.000,00	50,00%	48,99%
3.25.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	4.000.000,00	6	562.500,00	50,00%	14,06%
3.25.01.1.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli daerah [PAD]	12	bulan	116.160.000,00	6	38.441.741,00	50,00%	33,09%



3.25.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12	bulan	510.000,00	6	510.000,00	50,00%	100,00%
3.25.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	teraedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	bulan	115.650.000,00	6	37.931.741,00	50,00%	32,80%
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Peningkatan Pendapatan asli Daerah [PAD]</b>	<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>512.559.084,00</b>	<b>6</b>	<b>186.979.009,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>36,48%</b>
3.25.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	5	jenis	170.650.496,00	2	65.916.669,00	40,00%	38,63%
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan /rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor, terselenggaranya kebersihan kantor, terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	12	bulan	326.917.588,00	6	121.062.340,00	50,00%	37,03%
<b>3.25.04</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Peningkatan Pendapatan Asli Daerah [PAD]</b>	<b>284400000</b>	<b>rupiah</b>	<b>4.340.604.572,00</b>	<b>0</b>	<b>54.104.297,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,25%</b>
<b>3.25.04.1.05</b>	<b>Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut</b>	<b>Peningkatan Pendapatan Asli Daerah [PAD]</b>	<b>284400000</b>	<b>rupiah</b>	<b>4.340.604.572,00</b>	<b>0</b>	<b>54.104.297,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,25%</b>



3.25.04.1.05.03	Penyediaan prasarana budidaya ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan /atau manfaat auat dampak negatifnya lintas daerah kabupaten kota	Tersedianya benih, benih calon induk, induk ikan air payau	12	bulan	1.265.926.600,00	6	43.271.054,00	50,00%	3,42%
3.25.04.1.05.05	Penyediaan sarana budidaya ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan /atau manfaat auat dampak negatifnya lintas daerah kabupaten kota	Tersedianya calon induk dan induk ikan air tawar	12	bulan	3.074.677.972,00	6	10.833.243,00	50,00%	0,35%



Beberapa hal penting dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan pada Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kelautan dan Perikanan tahun 2021 adalah;

**1. Realisasi program/kegiatan yang sudah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;**

Dari 6 Program, 15 Kegiatan, dan 74 Sub Kegiatan. Realisasi program/kegiatan yang sudah memenuhi target kinerja hasil/keluaran pada Triwulan II tahun 2021 adalah sebanyak 1 kegiatan dan 8 sub kegiatan.

Adapun beberapa permasalahan terkait faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 yaitu :

- a. Kurangnya tenaga teknis di dalam pelaksanaan pembinaan pengembangan perikanan tangkap di kabupaten /kota,
- b. Adanya pembatalan beberapa pertemuan di tingkat pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) menyebabkan terjadinya pengembalian biaya-biaya perjalanan dinas yang tidak terrealisasi,
- c. Turunnya pagu alokasi dana dekonsentrasi Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menyebabkan turunnya standar honorarium pengelola keuangan sehingga terjadi pengembalian sisa anggaran kegiatan,
- d. Personel UPTD KKP Nusa Penida belum semua memahami teknis pengawasan dan monitoring Sumberdaya dan Sosial Ekonomi/patrol di perairan Nusa Penida,
- e. Adanya pembatasan-pembatasan pada masa pandemi covid-19 sehingga kegiatan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan.

**2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;**

Dari 6 Program, 15 Kegiatan, dan 74 Sub Kegiatan Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; adalah : Tidak Ada

**3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:**

Dalam mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 tersebut dapat dilakukan beberapa hal yaitu :

- a. Memanfaatkan atau menambah SDM tenaga teknis yang ada di bidang kelautan dan perikanan,
- b. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral,
- c. Melaksanakan refocusing anggaran,





- d. Melakukan pelatihan patroli kepada personel UPTD. KKP Bali
- e. Melakukan kegiatan via daring melalui video conference dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Data hasil evaluasi realisasi penyerapan Anggaran APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Triwulan II tahun 2021 dapat disajikan dalam tabel 2.1.6 sebagai berikut :

Tabel 2.1.6

Hasil evaluasi realisasi penyerapan anggaran APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Triwulan II tahun 2021

No	Program	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Sisa Anggaran
<b>A. Dinas Kelautan dan Perikanan</b>					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	13.365.939.824	5.557.542.603	41,58%	7.808.397.221
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	148.570.396	31.859.682	21,44%	116.710.714
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	168.246.768	18.048.120	10,73%	150.198.648
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	53.031.148	13.158.816	24,81%	39.872.332
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	112.088.868	75.220.520	67,11%	36.868.348
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	26.344.800	13.053.100	49,55%	13.291.700
<b>B UPTD Kawasan Konservasi Perairan</b>					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.855.095.766	656.576.898	35,39%	1.198.518.868
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan pulau-pulau kecil	1.448.614.928	229.475.170	15,84%	1.219.139.758
<b>C UPTD Pelabuhan Perikanan</b>					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	2.217.908.394	405.077.643	18,26%	1.812.830.751
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	37.476.448	13.158.816	35,11%	24.317.632
<b>D UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan</b>					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.739.818.056	1.020.564.854	37,25%	1.719.253.202
2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	349.414.012	183.718.650	52,58%	165.695.362
<b>E UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut</b>					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	5.111.277.182	1.406.319.138	27,51%	3.704.958.044
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.340.604.572	54.104.297	1,25%	4.286.500.275
		<b>31.974.431.162</b>	<b>9.677.878.307</b>	<b>31,32%</b>	<b>22.296.552.855</b>



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tergolong cukup baik dilihat dari realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II tahun 2021, dengan mendapat alokasi belanja dari APBD Provinsi Bali sebanyak Rp. 31.974.431.162,00 dengan realisasi fisik 31,72% dan keuangan Rp. 9.677.878.307,00 (31,32 %).

Analisis Kinerja Pelayanan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut: Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali merupakan Dinas yang tidak mengukur kinerjanya berdasarkan SPM, tetapi menggunakan NSPK dan IKK serta IKU. Norma Standar Prosedur Kegiatan telah dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, sedangkan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 IKK sebagai ukuran keberhasilan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.7 Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Untuk jelasnya berikut disajikan dalam tabel T C-29 (lampiran I) dan tabel T C-30.

Tabel C-30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2019

No	Indikator	SPM/ Stnad ar Nasio nal	IK K	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Ca tat an An alis is
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Produksi Perikanan (%)	-	v	110	102	104	106	60	99.69	-	-	
2	Produksi Perikanan (Ton)	-	v	226,5 17.79	117, 344. 85	119, 691. 57	121, 713. 44	136, 178. 55	116, 987. 16	-	-	
3	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Th)	-	v	34.86	35.5 5	36.2 6	34.8 7	34.5 6	33.5 2	-	-	
4	Capaian Bina Kelompok Nelayan (%)	-	v	100	60	70	80	100	100	-	-	
5	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%)	-	v	100	60	70	80	107. 36	183. 88	-	-	

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Adapun Isu – Isu Yang Berkembang Pada Tahun 2021 Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Adalah Sebagai Berikut :

#### a. Isu-Isu

- 1) Belum optimalnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan;
- 2) Masih rendahnya daya saing produk kelautan dan perikanan;
- 3) Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan;



- 4) Menurunnya kualitas ekosistem perairan umum, pesisir dan laut; dan
- 5) Belum optimalnya peran sektor kelautan dan perikanan dalam menunjang pendapatan daerah.

#### Solusi

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- (1) Optimalisasi pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan dengan tetap terjaga kelestariannya
- (2) Pemberdayaan masyarakat pesisir
- (3) Pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan
- (4) Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)
- (5) Penggalan potensi pendapatan baru dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang telah ada

## **2.4 Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD**

Dalam Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD diuraikan sebagai berikut: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Akhir Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terutama hasil capaian kinerja Triwulan II Tahun 2021 dan kebutuhan tahun 2021. Alasan proses tersebut dilakukan; untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan serta menyesuaikan antara kinerja program dan kegiatan, kemampuan keuangan serta kebutuhan program dan kegiatan tahun 2021.

Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Akhir RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan Provinsi Bali tahun 2021, tidak perlu mengusulkan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Akhir Perubahan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan ( Lampiran 2 Tabel T C-31)

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada Forum Konsultasi Publik ada beberapa Usulan Masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten maupun yang diusulkan ke Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan sebagai berikut :

1. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan maupun tertulis di masukan dalam daftar panjang;



2. Oleh Tim Penyusun Renja disusun sesuai dengan skala prioritas yang pada nantinya akan dibahas dalam Musrenbang menjadi daftar pendek

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021  
Provinsi Bali

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	8 Kabupaten di Bali	Jumlah produksi perikanan tangkap	101.082,74 Ton	
2	Program Pengembangan Budidaya Ikan	8 Kabupaten di Bali	Jumlah produksi perikanan budidaya	18.244,14 Ton	
3	Program Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan	Denpasar	Jumlah produk perikanan bersertifikat	34,19 Kg/Kapita/Tahun	
4	Program Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Bali	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)	3 Kawasan	
5	Program Peningkatan pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Denpasar	Jumlah sampel yang diuji	4.850 sampel	
6	Program Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	Badung dan Buleleng	Jumlah produksi ikan yang didaratkan dipelabuhan perikanan	10.000 Ton	
7	Program Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Provinsi Bali	Jumlah Kawasan konservasi yang dikelola	1 Kawasan	
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



8	Program Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	Badung dan Klungkung	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.284.400.000	
9	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Denpasar	Nilai laporan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	77	
10	Program Peningkatan Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Provinsi Bali	Jumlah pelaku usaha taat hukum	15 Kelompok	

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Untuk menyusun Tujuan dan sasaran diperlukan Rancangan Akhir Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan mengacu pada Rancangan Akhir Teknokratik RPJMD Provinsi Bali 2018-2023. Selanjutnya pada Bab III Renja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, dan 3) Program dan Kegiatan

### 3.1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN disusun telaahan kebijakan Kelautan dan Perikanan pada Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN. Arah Kebijakan Kelautan dan Perikanan pada RPJMN secara ringkas adalah : Mendukung ketahanan pangan, daya saing dan nilai tambah Kelautan dan Perikanan serta memelihara keberlanjutan pembangunan.

Terkait dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan serta isu strategis yang berkembang, maka ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah:

- (1) Pengembangan Perikanan Budidaya berbasis kawasan dan komoditi.
- (2) Optimalisasi produksi dan produktivitas nelayan, sarana dan prasarana perikanan tangkap secara terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengelolaan dan pemasaran produk hasil perikanan serta pengembangan budaya makan ikan
- (4) Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

### 3.2) Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi Tujuan dan sasaran pada RPJMD Provinsi Bali 2013-2018, Rancangan Akhir Teknokratik RPJMD Provinsi Bali 2018-2023, Rancangan Akhir Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan maka, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai adalah : Meningkatkan produksi perikanan budidaya, tangkap, olahan dan garam. Meningkatkan devisa negara dan pendapatan daerah dari ekspor hasil perikanan. Meningkatkan tingkat konsumsi ikan. Meningkatkan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.



Untuk mencapai tujuan meningkatkan nilai tambah Kelautan dan perikanan Provinsi Bali, ditetapkan delapan sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya produksi perikanan tangkap
- b. Meningkatnya produksi perikanan budidaya
- c. Meningkatkan produksi olahan
- d. Meningkatkan produksi garam
- e. Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan
- f. Meningkatnya PAD
- g. Meningkatnya konsumsi ikan
- h. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan, ekosistem perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

### 3.3) Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran, dikembangkan Program dan Kegiatan. Program dan kegiatan Kelautan dan Perikanan berisikan penjelasan mengenai: a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain dan Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan.

### Program dan Kegiatan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>
<b>1</b>	<b><i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></b>
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>2</b>	<b><i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut)
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (UPTD Pelabuhan Perikanan)
<b>3</b>	<b><i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut)
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)





- 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Pelabuhan Perikanan)
- 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut)
- 6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)
- 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)
- 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pelabuhan Perikanan)
- 9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut)
- 11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)
- 12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)
- 13 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 14 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut)
- 15 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)
- 16 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)
- 17 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD Pelabuhan Perikanan)
- 18 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)
- 19 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (UPTD Pelabuhan Perikanan)
- 20 Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)
- 21 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)
- 23 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Pelabuhan Perikanan)
- 4 *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***
  - 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)
- 5 *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***
  - 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut)
  - 3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)
  - 4 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)
  - 5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 6 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut)
  - 7 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)
  - 8 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)
  - 9 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Pelabuhan Perikanan)
  - 10 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)
- 6 *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***
  - 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)



- 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut)
  - 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)
  - 5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Pelabuhan Perikanan)
  - 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)
  - 7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 8 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut)
  - 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)
  - 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Pelabuhan Perikanan)
  - 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**
- 1 *Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi***
    - 1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
    - 2 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
    - 3 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)
  - 2 *Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi***
    - 1 Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
- 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**
- 1 *Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil***
    - 1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
    - 2 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
  - 2 *Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi***
    - 1 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan (UPTD Pelabuhan Perikanan)
- 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**
- 1 *Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut***
    - 1 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut)
    - 2 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut)
    - 3 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 5 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
- 1 *Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil***
    - 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
    - 2 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
    - 3 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil



**2 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

- 1 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

**6 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**

**1 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**

- 1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
- 2 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)
- 3 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)

**2 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

- 1 Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Program : 6  
Kegiatan : 15  
Sub Kegiatan : 74



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI**

Pada Bab IV tentang Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan seluruh Program/Kegiatan yang terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali maka dibutuhkan dana sebesar Rp.32.282.523.170,00, namun terdapat rasionalisasi sehingga pagu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menjadi Rp. 27.953.015.478,00

Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam lampiran 3 tabel T C-33.

## BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2021 sebagai dasar dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran (RKA/DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2021 maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- f. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan.
- g. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dan UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut, UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali, UPTD Pelabuhan Perikanan berkewajiban mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja) Semesta Berencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2021 serta diselaraskan dengan Perubahan RKPD Provinsi Bali tahun 2021.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renja Semesta Berencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2021 wajib dilaksanakan pengendalian dari evaluasi program dan kegiatan tahun 2021.

### 5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana kerja Perubahan (Renja) Semesta Berencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.



Demikianlah Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Semesta Berencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2021 disusun sebagai dasar dan pedoman penyusunan Rencana Anggaran (RKA/DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2021 semoga ada manfaatnya dalam meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2021 dan atas segala masukan para pihak kami ucapkan terima kasih.

Bali, 20 September 2021

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Bali

Ir. I Made Sudarsana, M.Si

---

Pembina Utama Muda

NIP. 19650810 199203 1 017

Tabel T-C 19  
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan  
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali  
Triwulan II Tahun 2021

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5		6		7			8		9 = (8/7) x 100%		10 = 6 + 8		11 = (10/5) x 100%	
	3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja					78%	persen	13,365,939,824.00	25%	5,557,542,603.00	32.05%	41.58%				
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Nilai evaluasi manajemen kinerja					78%	persen	1,800,000.00	25%	-	32.05%	0.00%	0.25	-		
	3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen					1	dokumen	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-		
	3.25.01.1.01.03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD					1	dokumen	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-		
	3.25.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-					1	dokumen	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-		
	3.25.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan					1	dokumen	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-		
	3.25.01.1.01.07	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4	dokumen	1,800,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-		
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja					78%	persen	11,503,379,138.00	25%	4,890,588,007.00	32.05%	42.51%	0.25	4,890,588,007.00		
	3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN					52	dokumen	11,503,379,138.00	29	4,890,588,007.00	55.77%	42.51%	29	4,890,588,007.00		
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja					78%	persen	167,630,210.00	25%	84,950,055.00	32.05%	50.68%	0.25	84,950,055.00		
	3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					1	tahun	23,627,210.00	0.5	23,516,630.00	50.00%	99.53%	0.5	23,516,630.00		
	3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan					1	tahun	75,000,000.00	0.5	32,444,000.00	50.00%	43.26%	0.5	32,444,000.00		
	3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					1	tahun	16,653,000.00	0.5	6,890,675.00	50.00%	41.38%	0.5	6,890,675.00		
	3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					1	tahun	52,350,000.00	0.5	22,098,750.00	50.00%	42.21%	0.5	22,098,750.00		
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja					78%	persen	97,000,000.00	25%	625,000.00	32.05%	0.64%	0.25	625,000.00		
	3.25.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor					1	tahun	97,000,000.00	0.5	625,000.00	50.00%	0.64%	0.5	625,000.00		

3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja					78%	persen	119,365,076.00	25%	55,277,133.00	0.00%	46.31%	0.25	55,277,133.00		
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat					1	tahun	3,000,000.00	1	3,000,000.00	100.00%	100.00%	1	3,000,000.00		
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik					1	tahun	116,365,076.00	0.5	52,277,133.00	50.00%	44.93%	0.5	52,277,133.00		
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran					1	Tahun	1,476,765,400.00	0.5	526,102,408.00	50.00%	35.63%	0.5	526,102,408.00		
3.25.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala					1	tahun	537,702,984.00	0.5	256,204,226.00	50.00%	47.65%	0.5	256,204,226.00		
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor					1	tahun	691,512,416.00	0.5	231,762,382.00	50.00%	33.52%	0.5	231,762,382.00		
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dinas secara rutin/berkala					1	tahun	247,550,000.00	0.5	38,135,800.00	50.00%	15.41%	0.5	38,135,800.00		
3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan					1	Kawasan	148,570,396.00	0.13	31,859,682.00	13.00%	21.44%	0.13	31,859,682.00		
		Jumlah kawasan WP3K yang meningkat kualitasnya					5	Kawasan		1		20.00%		1	-		
3.25.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.	Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan					1	kawasan	98,958,648.00	0.13	18,055,866.00	13.00%	18.25%	0.13	18,055,866.00		
3.25.02.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali					1	kawasan	78,958,648.00	0.15	14,844,816.00	15.00%	18.80%	0.15	14,844,816.00		
3.25.02.1.01.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat.	Terlaksananya kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan					5	kawasan	20,000,000.00	0.2	3,211,050.00	4.00%	16.06%	0.2	3,211,050.00		
3.25.02.1.02	Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 1 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah kawasan WP3K yang meningkat kualitasnya					5	kawasan	49,611,748.00	1	13,803,816.00	20.00%	27.82%	1	13,803,816.00		
3.25.02.1.02.02	Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pelaku usaha yang memahami izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi					5	kawasan	49,611,748.00	1	13,803,816.00	20.00%	27.82%	1	13,803,816.00		



3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap				101,082.74	ton	168,246,768.00	26,022.00	18,048,120.00	25.74%	10.73%	26022	18,048,120.00		
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				101,082.74	ton	168,246,768.00	26,022.00	18,048,120.00	25.74%	10.73%	26022	18,048,120.00		
3.25.03.1.01.01	Penyediaan data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Penyusunan Data dan Informasi Sumber daya Ikan				8	kabupaten	58,331,868.00	3	18,048,120.00	37.50%	30.94%	3	18,048,120.00		
3.25.03.1.01.03	Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Fasilitasi Pendamping LPMUKP				8	orang	109,914,900.00	3	-	37.50%	0.00%	3	-		
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				18,609.02	ton	53,031,148.00	4,275.00	13,158,816.00	22.97%	24.81%	4275	13,158,816.00		
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				18,609.02	ton	53,031,148.00	4,275.00	13,158,816.00	22.97%	24.81%	4275	13,158,816.00		
3.25.04.1.05.06	Pengelolaan kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di laut dan lintas darat	Jumlah monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan				17	kali	53,031,148.00	4	13,158,816.00	23.53%	24.81%	4	13,158,816.00		
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA LAUT DAN PERIKANAN	Jumlah pelaku usaha taat Hukum				23	pelaku usaha	37,620,000.00	9	20,520,000.00	39.13%	54.55%	9	20,520,000.00		
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 MIL	Jumlah Pelaku usaha taat hukum				23	pelaku usaha	26,220,000.00	8	15,960,000.00	34.78%	60.87%	8	15,960,000.00		
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Bidangh Kelautan Yang diawasi				23	pelaku usaha	17,100,000.00	8	6,840,000.00	34.78%	40.00%	8	6,840,000.00		
3.25.05.1.01.02	Pengawasan usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi				8	pelaku usaha	6,840,000.00	3	6,840,000.00	37.50%	100.00%	3	6,840,000.00		
3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang pembudidayaan Ikan di laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha perikanan Budidaya yang diawasi				2	pelaku usaha	2,280,000.00	2	2,280,000.00	100.00%	100.00%	2	2,280,000.00		
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber daya perikanan di wilayah sungai,danau,waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/kota dalam 1 [satu] daerah provinsi	Jumlah pelaku usaha taat hukum				50	pelaku usaha	11,400,000.00	2	4,560,000.00	4.00%	40.00%	2	4,560,000.00		
3.25.05.1.02.03	Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 [satu] daerah provinsi	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang diawasi				10	pelaku usaha	11,400,000.00	2	4,560,000.00	20.00%	40.00%	2	4,560,000.00		
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produk yang bersertifikat				149	SKP	112,088,868.00	91	75,220,520.00	61.07%	67.11%	91	75,220,520.00		

3.25.06.1.02	Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Jumlah produk yang bersertifikat				149	SKP	112,088,868.00	91	75,220,520.00	61.07%	67.11%	91	75,220,520.00		
3.25.06.1.02.01	Sub kegiatan pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Jumlah penerima paket gemarikan ; Pembinaan mutu dan nilai tambah produk olahan hasil perikanan				200	paket	112,088,868.00	115	75,220,520.00	57.50%	67.11%	115	75,220,520.00		
						25	UPI		0		0.00%		0	-		
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produk yang bersertifikat				149	SKP	26,344,800.00	91	13,053,100.00	61.07%	49.55%	91	13,053,100.00		
3.25.06.1.03	Kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah produk yang bersertifikat				149	SKP	26,344,800.00	91	13,053,100.00	61.07%	49.55%	91	13,053,100.00		
3.25.06.1.03.01	Sub kegiatan Pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah penerima paket gemarikan ; Pembinaan mutu dan nilai tambah produk olahan hasil perikanan				100	buku	26,344,800.00	74	13,053,100.00	74.00%	49.55%	74	13,053,100.00		
													0	-		
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				78%	persen	1,855,095,766.00	25%	656,576,898.00	32.05%	35.39%	0.25	656,576,898.00		
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				78%	persen	1,713,800,166.00	25%	574,147,341.00	32.05%	33.50%	0.25	574,147,341.00		
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM dan tunjangan ASN				52	dokumen	1,713,800,166.00	29	574,147,341.00	55.77%	33.50%	29	574,147,341.00		
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan				1	kawasan	55,096,000.00	0.5	14,772,658.00	50.00%	26.81%	0.5	14,772,658.00		
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola				1	kawasan	1,050,000.00	0.9	921,000.00	90.00%	87.71%	0.9	921,000.00		
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola				1	kawasan	40,482,000.00	0.5	10,089,133.00	50.00%	24.92%	0.5	10,089,133.00		

3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola				1	kawasan	10,000,000.00	0.5	2,680,000.00	50.00%	26.80%	0.5	2,680,000.00		
3.25.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola				1	kawasan	1,764,000.00	0.5	722,525.00	50.00%	40.96%	0.5	722,525.00		
3.25.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola				1	kawasan	1,800,000.00	0.5	360,000.00	50.00%	20.00%	0.5	360,000.00		
3.25.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola				1	kawasan	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-		
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat konsultasi SKPD	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola				1	kawasan	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-		
3.25.01.1.07	<b>Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan</b>				1	kawasan	<b>5,400,000.00</b>	<b>1</b>	<b>5,291,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.98%</b>	<b>1</b>	<b>5,291,000.00</b>		
3.25.01.1.07.10	Pengadaan sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola				1	kawasan	5,400,000.00	1	5,291,000.00	100.00%	97.98%	1	5,291,000.00		
3.25.01.1.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan					1	kawasan	6,350,000.00	0.5	2,261,900.00	50.00%	35.62%	0.5	2,261,900.00		
3.25.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	JumlahKawasan Konservasi yang dikelola				1	kawasan	450,000.00	1	450,000.00	100.00%	100.00%	1	450,000.00		
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	JumlahKawasan Konservasi yang dikelola				1	kawasan	5,900,000.00	0.5	1,811,900.00	50.00%	30.71%	0.5	1,811,900.00		
3.25.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan</b>				1	kawasan	<b>74,449,600.00</b>	<b>0.87</b>	<b>60,103,999.00</b>	<b>87.00%</b>	<b>80.73%</b>	<b>0.87</b>	<b>60,103,999.00</b>		
3.25.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola				1	kawasan	74,449,600.00	0.87	60,103,999.00	87.00%	80.73%	0.87	60,103,999.00		
3.25.02.1	<b>Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan pulau-pulau kecil</b>	<b>Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola</b>				1	kawasan	<b>1,448,614,928.00</b>	<b>0.32</b>	<b>229,475,170.00</b>	<b>32.00%</b>	<b>15.84%</b>	<b>0.32</b>	<b>229,475,170.00</b>		
3.25.02.1.01	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai 12 Mil Diluar minyak dan Gas Bumi</b>	<b>Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola</b>				1	kawasan	<b>1,448,614,928.00</b>	<b>0.32</b>	<b>229,475,170.00</b>	<b>32.00%</b>	<b>15.84%</b>	<b>0.32</b>	<b>229,475,170.00</b>		

3.25.02.1.01.01	Pengelolaan kawasan Konservasi di Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola					1	kawasan	1,448,614,928.00	0.32	229,475,170.00	32.00%	15.84%	0.32	229,475,170.00		
														0	-		
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja					78%	persen	2,217,908,394.00	25%	405,077,643.00	32.05%	18.26%	0.25	405,077,643.00		
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja					78%	persen	2,005,681,516.00	25%	335,826,062.00	32.05%	16.74%	0.25	335,826,062.00		
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN					52	dokumen	2,005,681,516.00	29	672,304,686.00	55.77%	33.52%	29	672,304,686.00		
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di Pelabuhan					78%	persen	74,023,050.00	25%	11,066,052.00	32.05%	14.95%	0.25	11,066,052.00		
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan					10	ton	2,244,400.00	5	1,305,500.00	50.00%	58.17%	5	1,305,500.00		
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Pelabuhan Perikanan dan Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran					80	nelayan	39,082,650.00	30	8,871,052.00	37.50%	22.70%	30	8,871,052.00		
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan					10	ton	1,776,000.00	4	439,500.00	40.00%	24.75%	4	439,500.00		
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan					10	ton	1,800,000.00	4	450,000.00	40.00%	25.00%	4	450,000.00		
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan					10	ton	29,120,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-		
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan					10	ton	16,560,780.00	4	3,417,213.00	40.00%	20.63%	4	3,417,213.00		
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan					10	ton	16,560,780.00	4	3,417,213.00	40.00%	20.63%	4	3,417,213.00		
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas dan gedung yang terpelihara					10	ton	121,643,048.00	8	54,768,316.00	80.00%	45.02%	8	54,768,316.00		

3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan					10	ton	64,166,600.00	4	32,567,000.00	40.00%	50.75%	4	32,567,000.00		
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan					10	ton	57,476,448.00	4	22,201,316.00	40.00%	38.63%	4	22,201,316.00		
3.25.03.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan					1	Pejabuhan	37,476,448.00	0.23	13,158,816.00	23.00%	35.11%	0.23	13,158,816.00		
3.25.03.1.06	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan					60	Nelayan	37,476,448.00	14	13,158,816.00	23.33%	35.11%	14	13,158,816.00		
3.25.03.1.06.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik dan Terlaksananya Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Nelayan					60	nelayan	37,476,448.00	14	13,158,816.00	23.33%	35.11%	14	13,158,816.00		
														0	-		
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja					78%	persen	2,739,818,056.00	25%	1,020,564,854.00	32.05%	37.25%	0.25	1,020,564,854.00		
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan	Nilai evaluasi manajemen kinerja					52	dokumen	2,092,936,862.00	29	785,554,415.00	55.77%	37.53%	29	785,554,415.00		
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN					52	dokumen	2,092,936,862.00	29	785,554,415.00	55.77%	37.53%	29	785,554,415.00		
3.25.01.1.06	- Administrasi Umum perangkat daerah	Jumlah ATK yg tersedia, jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan, jumlah barang cetak dan penggandaan yg tersedia					3	paket	26,902,010.00	1	6,616,550.00	33.33%	24.60%	1	6,616,550.00		
3.25.01.1.06.02	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah ATK yang disediakan					1	paket	3,782,010.00	1	3,008,000.00	100.00%	79.53%	1	3,008,000.00		
		- Jumlah ATK yang disediakan					2	buah		0	-	0.00%		0	-		

			- Jumlah ATK yang disediakan				22	rim		0		0.00%	#DIV/0!	0			
3.25.01.1.06.04	- Penyediaan bahan logistik kantor		- Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan				1	tahun	20,000,000.00	0.5	2,494,800.00	50.00%	12.47%	0.5	2,494,800.00		
3.25.01.1.06.05	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		- Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				1	paket	3,120,000.00	0.5	1,113,750.00	50.00%	35.70%	0.5	1,113,750.00		
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>Jumlah materai yg tersedia, jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan</b>				<b>3</b>	<b>paket</b>	<b>227,350,000.00</b>	<b>1</b>	<b>74,919,629.00</b>	<b>33.33%</b>	<b>32.95%</b>	<b>1</b>	<b>74,919,629.00</b>		
3.25.01.1.08.01	- Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah materai yang tersedia				150	lembar	750,000.00	150	750,000.00	100.00%	100.00%	150	750,000.00		
3.25.01.1.08.02	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik		- Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				3	jenis	111,600,000.00	2	31,313,868.00	66.67%	28.06%	2	31,313,868.00		
3.25.01.1.08.04	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dan Jumlah Sistem Manajemen Mutu yang terpelihara				2	paket	115,000,000.00	1	42,855,761.00	50.00%	37.27%	1	42,855,761.00		
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>- Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala</b>				<b>100%</b>	<b>persen</b>	<b>392,629,184.00</b>	<b>40%</b>	<b>153,474,260.00</b>	<b>40.00%</b>	<b>39.09%</b>	<b>0.4</b>	<b>153,474,260.00</b>		
3.25.01.1.09.02	Sub kegiatan													0	-		
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan yang dipelihara				3	unit	127,050,496.00	2	48,150,140.00	66.67%	37.90%	2	48,150,140.00		

3.25.01.1.09.06	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara				16	unit	48,196,448.00	10	24,331,520.00	62.50%	50.48%	10	24,331,520.00		
3.25.01.1.09.09	- Pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Luas Gedung Kantor yang dipelihara				150	m2	217,382,240.00	67	80,992,600.00	44.67%	37.26%	67	80,992,600.00		
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Hasil Uji yang dikeluarkan				4900	Sample	349,414,012.00	1413	183,718,650.00	28.84%	52.58%	1413	183,718,650.00		
3.25.06.02	- Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Rekomendasi hasil uji produk perikanan, terjaganya UPI yang menerapkan persyaratan sertifikasi SNI				2	paket	349,414,012.00	1	183,718,650.00	50.00%	52.58%	1	183,718,650.00		
3.25.06.02.01	- Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar.	Jumlah produk perikanan yang diuji				4900	sampel	327,314,012.00	1413	161,618,650.00	28.84%	49.38%	1413	161,618,650.00		
3.25.06.02.02	- Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing	Jumlah UPI yang di surveillance				9	UPI	22,100,000.00	2	22,100,000.00	22.22%	100.00%	2	22,100,000.00		
													0	-		
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				78%	persen	5,111,277,182.00	25%	1,406,319,138.00	32.05%	27.51%	0.25	1,406,319,138.00		

3.25.01.1.02	administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja					78%	persen	4,425,032,498.00	25%	1,161,683,807.00	32.05%	26.25%	0.25	1,161,683,807.00		
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN					52	dokumen	4,425,032,498.00	29	1,161,683,807.00	55.77%	26.25%	29	1,161,683,807.00		
3.25.01.1.06	Administrasi Umum perangkat Daerah	Presentase penerangan bangunan kantor yang tertangani, presentase upacara keagamaan yang tertangani, presentase pemeliharaan peralatan kantor yang tertangani dan presentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani					12	bulan	57,525,600.00	6	19,214,581.00	50.00%	33.40%	6	19,214,581.00		
3.25.01.1.06.01	Penpenerangan Bangunan kantoryediaan Komponen instalasi listrik/	Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor					3	jenis	1,434,600.00	3	1,304,181.00	100.00%	90.91%	3	1,304,181.00		
3.25.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor					5	jenis	22,091,000.00	2	2,649,900.00	40.00%	12.00%	2	2,649,900.00		
3.25.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan					12	bulan	30,000,000.00	6	14,698,000.00	50.00%	48.99%	6	14,698,000.00		



3.25.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12	bulan	4,000,000.00	6	562,500.00	50.00%	14.06%	6	562,500.00		
3.25.01.1.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli daerah [PAD]				12	bulan	116,160,000.00	6	38,441,741.00	50.00%	33.09%	6	38,441,741.00		
3.25.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				12	bulan	510,000.00	6	510,000.00	50.00%	100.00%	6	510,000.00		
3.25.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	teraedinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik				12	bulan	115,650,000.00	6	37,931,741.00	50.00%	32.80%	6	37,931,741.00		
3.25.01.1.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Pendapatan asli Daerah [PAD]				12	bulan	512,559,084.00	6	186,979,009.00	50.00%	36.48%	6	186,979,009.00		
3.25.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas				5	jenis	170,650,496.00	2	65,916,669.00	40.00%	38.63%	2	65,916,669.00		
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan /rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor, terselenggaranya kebersihan kantor, terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor				12	bulan	326,917,588.00	6	121,062,340.00	50.00%	37.03%	6	121,062,340.00		

3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah [PAD]				284400000	rupiah	4,340,604,572.00	0	54,104,297.00	0.00%	1.25%	0	54,104,297.00		
3.25.04.1.05	Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah [PAD]				284400000	rupiah	4,340,604,572.00	0	54,104,297.00	0.00%	1.25%	0	54,104,297.00		
3.25.04.1.05.03	Penyediaan prasarana budidaya ikan di air payau dan air tawar yang penguasaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan /atau manfaat auat dampak negatifnya lintas daerah kabupaten kota	Tersedianya benih, benih calon induk, induk ikan air payau				12	bulan	1,265,926,600.00	6	43,271,054.00	50.00%	3.42%	6	43,271,054.00		
3.25.04.1.05.05	Penyediaan sarana budidaya ikan di air payau dan air tawar yang penguasaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan /atau manfaat auat dampak negatifnya lintas daerah kabupaten kota	Tersedianya calon induk dan induk ikan air tawar				12	bulan	3,074,677,972.00	6	10,833,243.00	50.00%	0.35%	6	10,833,243.00		

#### 1. Telaahan Hasil Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan

- |   |  |   |   |              |
|---|--|---|---|--------------|
| 1 | Program yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2021      | : | 0 | program      |
| 2 | Kegiatan yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2021     | : | 0 | kegiatan     |
| 3 | Sub Kegiatan yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2021 | : | 2 | sub kegiatan |

#### Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

- Kurangnya tenaga teknis di dalam pelaksanaan pembinaan pengembangan perikanan tangkap di kabupaten /kota.
- Kurangnya sosialisasi peraturan perizinan
- Kurangnya koordinasi lintas sektoral
- Adanya pembatalan beberapa pertemuan di tingkat pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) menyebabkan terjadinya pengembalian biaya-biaya perjalanan dinas yang tidak terrealisasi
- Turunnya pagu alokasi dana dekonstruksi Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menyebabkan turunnya standar honorarium pengelola keuangan sehingga terjadi pengembalian sisa anggaran kegiatan
- Akibat adanya pembatasan-pembatasan pada masa pandemi covid-19 sehingga kegiatan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan

#### Langkah-langkah untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

- Memanfaatkan SDM yang ada

- Melaksanakan sosialisasi baik melalui media sosial maupun daring
- Melaksanakan koordinasi lintas sektoral
- Penambahan anggaran
- Melakukan kegiatan via daring melalui video conference

### 2. Telaahan Hasil Evaluasi UPTD Kawasan Konservasi Perairan

1	Program yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2021	:	0	program
2	Kegiatan yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2021	:	1	kegiatan
3	Sub Kegiatan yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2021	:	2	sub kegiatan

### Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

- Peningkatan eksistensi KKP Nusa Penida pasca pemindahan kewenangan ke Provinsi Bali
- Personel UPTD KKP Nusa Penida belum semua memahami teknis pengawasan dan monitoring Sumberdaya dan Sosial Ekonomi/patrol di perairan Nusa Penida
- Kurangnya tanda batas zonasi di laut
- Tidak adanya tanda pengenalan tim, seperti seragam yang berlogo provinsi
- Diperlukan media informasi mengenai KKP Nusa Penida
- Kurangnya pendataan dan pemantauan seluruh kegiatan Rehabilitasi karang di Nusa Penida
- Banyaknya isu kerusakan dan pencemaran KKP Nusa Penida

### Langkah-langkah untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

- Mengadakan sosialisasi di desa pesisir dan kepada pelaku wisata
- Melakukan pelatihan patroli kepada personel UPTD. KKP Bali
- Penambahan anggaran untuk pembuatan tanda batas zonasi dan pembuatan Website UPTD KKP
- Pembuatan bendera patroli dan pembuatan baju seragam UPTD KKP Bali  
Semua pihak yang melakukan kegiatan rehabilitasi karang agar melaporkan kepada UPTD KKP Bali di Nusa Penida  
Peningkatan kegiatan Beach Clean UP dan membentuk TIM Tanggap.

### 3. Telaahan Hasil Evaluasi UPTD Pelabuhan Perikanan

1	Program yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2021	:	0	program
2	Kegiatan yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2021	:	0	kegiatan
3	Sub Kegiatan yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2021	:	0	sub kegiatan

### Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

- Penyerapan anggaran tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- Kurangnya SDM yang ada di UPTD Pelabuhan Perikanan
- belum maksimalnya produksi tangkapan bagi nelayan yang mendarat di pelabuhan perikanan
- Belum adanya peraturan yang di pakai sebagai acuan di pelabuhan perikanan.

### Langkah-langkah untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

- menentukan skala prioritas terhadap pelaksanaan kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan sesuai tingkat kepentingan atau urgensinya serta sosialisasi Rancangan perda redistribusi.

### 4. Telaahan Hasil Evaluasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

1	Program yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2021	:	0	program
2	Kegiatan yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2021	:	0	kegiatan
3	Sub Kegiatan yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2021	:	3	sub kegiatan

### Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

- rasionalisasi anggaran yang menyebabkan ada pekerjaan surveilans SNI ISO 9001:2015 tidak dapat dilaksanakan
- perawatan beberapa peralatan yang tidak bisa direalisasikan secara optimal

### Langkah-langkah untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

- Mengusulan anggaran pada tahun anggaran 2022.
- Menggunakan peralatan yang ada dan masih bisa difungsikan secara optimal

### 5. Telaahan Hasil Evaluasi UPTD Produksi Perikanan Air Payau/Laut

1	Program yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2021	:	0	program
2	Kegiatan yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2021	:	0	kegiatan

3 Sub Kegiatan yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2021 : 1 sub kegiatan

**Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021**

- 1 kreatifitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan uji coba perikanan budidaya
- 2 terbatasnya sarana dan prasarana untuk kegiatan uji coba penerapan teknologi perikanan budidaya seperti misalnya kurang kincir air sebagai supply oksigen pada kegiatan pembesaran calon induk udang aalah.

**Langkah-langkah untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021**

- 1 Melaksanakan pelatihan sehingga diharapkan ada peningkatan kreatifitas dan inovasi SDM
- 2 penambahan sarana dan prasarana untuk kegiatan uji coba perikanan budidaya seperti misalnya penambahan sarana seperti kincir air, root blower serta adanya bantuan dari Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang perikanan budidaya air payau/laut

**Tabel T-C.31**  
**Review terhadap Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2020**

No	RKPD Provinsi Bali				Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Provinsi Bali				Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan	
			Capaian	Indikatif			Capaian	Dana	
<b>A</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	11,717,712,690.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	11,717,712,690.00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan	1 Ha	91,800,196.00	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan	1 Ha	91,800,196.00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	101.082,74 Ton	145,716,768.00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	101.082,74 Ton	145,716,768.00	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	18.609,02 Ton	38,387,148.00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	18.609,02 Ton	38,387,148.00	
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelaku usaha taat hukum	50 Pelaku Usaha	18,240,000.00	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelaku usaha taat hukum	50 Pelaku Usaha	18,240,000.00	
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk perikanan bersertifikat	149 SKP	114,778,668.00	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk perikanan bersertifikat	149 SKP	114,778,668.00	
<b>B</b>	<b>UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut</b>								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	3,835,772,739.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	3,835,772,739.00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	284.400.000 Rupiah	4,328,284,572.00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	284.400.000 Rupiah	4,328,284,572.00	
<b>C</b>	<b>UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan</b>								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	2,276,307,140.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	2,276,307,140.00	
2	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah hasil uji yang dikeluarkan	4.900 Sample	348,064,012.00	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah hasil uji yang dikeluarkan	4.900 Sample	348,064,012.00	
<b>D</b>	<b>UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali</b>								

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	1,552,056,874.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	1,552,056,874.00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan	1 Ha	1,448,614,928.00	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan	1 Ha	1,448,614,928.00	
<b>E UPTD Pelabuhan Perikanan</b>									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	1,999,803,295.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	1,999,803,295.00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di pelabuhan	1 Pelabuhan	37,476,448.00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di pelabuhan	1 Pelabuhan	37,476,448.00	
				<b>27,953,015,478.00</b>				<b>27,953,015,478.00</b>	

**Tabel T C-33**  
**Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Target Sebelum Perubahan		Target Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN</b>					<b>32,282,523,170.00</b>		<b>27,953,015,478.00</b>	<b>(4,329,507,692)</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Nilai evaluasi manajemen kinerja</b>	<b>78%</b>	<b>25,357,412,932.00</b>	<b>78%</b>	<b>21,381,652,738.00</b>	<b>(3,975,760,194)</b>
	<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>12,519,295.00</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>-</b>	<b>(12,519,295)</b>
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,400,000.00	1 Dokumen	-	(1,400,000)
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,400,000.00	1 Dokumen	-	(1,400,000)
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,400,000.00	1 Dokumen	-	(1,400,000)
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,400,000.00	1 Dokumen	-	(1,400,000)
		5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	6,919,295.00	4 Dokumen	-	(6,919,295)
	<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>52 Dokumen</b>	<b>21,632,016,983.00</b>	<b>52 Dokumen</b>	<b>18,042,457,828.00</b>	<b>(3,589,559,155)</b>
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	52 Dokumen	11,394,565,941.00	52 Dokumen	9,878,013,604.00	(1,516,552,337)
		2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut)	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	52 Dokumen	4,425,032,498.00	52 Dokumen	3,196,935,255.00	(1,228,097,243)
		3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	52 Dokumen	2,092,936,862.00	52 Dokumen	1,687,886,078.00	(405,050,784)
		4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	52 Dokumen	1,713,800,166.00	52 Dokumen	1,440,065,474.00	(273,734,692)
		5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (UPTD Pelabuhan Perikanan)	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	52 Dokumen	2,005,681,516.00	52 Dokumen	1,839,557,417.00	(166,124,099)

3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	<b>478,842,870.00</b>	1 Tahun	<b>254,702,270.00</b>	<b>(224,140,600)</b>	
	<b>(UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut)</b>	<b>Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor, terselenggaranya upacara keagamaan, jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor, jenis barang</b>	<b>12 Bulan</b>		<b>12 Bulan</b>			
	<b>(UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)</b>	<b>Jumlah ATK yang disediakan, Jumlah Upacara Keagamaan yang dilaksanakan, Jumlah barang cetakan &amp; perlengkapan yang tersedia</b>	<b>3 Paket</b>		<b>3 Paket</b>			
	<b>(UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)</b>	<b>Terlaksananya kegiatan perkantoran dan lancarnya administrasi perkantoran</b>	<b>100 persen</b>		<b>100 persen</b>			
	<b>(UPTD Pelabuhan Perikanan)</b>	<b>produksi ikan yang didaratkan dipelabuhan perikanan</b>	<b>10 Ton</b>		<b>10 Ton</b>			
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	1,434,600.00	3 Jenis	1,434,600.00	-
	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	1,050,000.00	1 Kawasan	1,050,000.00	-
	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD	Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	10 Ton	2,244,400.00	10 Ton	2,244,400.00	-
	4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	23,627,210.00	1 Tahun	23,627,210.00	-
	5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air	Jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5 Jenis	11,280,000.00	5 Jenis	4,260,000.00	(7,020,000)
	6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil	Jumlah ATK yang disediakan	1 paket; 2 buah; 22 rim	3,782,010.00	1 paket; 2 buah; 22 rim	3,782,010.00	-
	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	73,864,000.00	1 Kawasan	11,177,800.00	(62,686,200)
	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pelabuhan Perikanan)	Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan pelabuhan perikanan, dan Terlaksananya sosialisasi kegiatan operasional pelabuhan dan	80 nelayan	93,432,650.00	80 nelayan	16,221,650.00	(77,211,000)



	9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	1 Tahun	75,000,000.00	1 Tahun	75,000,000.00	-
	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut)	Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan	12 Bulan	30,000,000.00	12 Bulan	30,000,000.00	-
	11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)	Jumlah Upacara Keagamaan yang dilaksanakan	1 Tahun	20,000,000.00	1 Tahun	15,000,000.00	(5,000,000)
	12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	10,000,000.00	1 Kawasan	10,000,000.00	-
	13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	16,653,000.00	1 Tahun	12,861,400.00	(3,791,600)
	14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air)	tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	4,000,000.00	12 Bulan	3,437,200.00	(562,800)
	15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil)	Jumlah barang cetak & penggandaan yang tersedia	1 paket	3,120,000.00	1 paket	2,386,000.00	(734,000)
	16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	1,764,000.00	1 Kawasan	1,764,000.00	-
	17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD Pelabuhan Perikanan)	Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	10 Ton	1,776,000.00	10 Ton	1,776,000.00	-
	18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (UPTD Kawasan)	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	1,800,000.00	1 Kawasan	1,800,000.00	-
	19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (UPTD Pelabuhan)	Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	10 Ton	1,800,000.00	10 Ton	1,800,000.00	-
	20	Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	3,150,000.00	1 Kawasan	-	(3,150,000)
	21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	52,350,000.00	1 Tahun	35,080,000.00	(17,270,000)
	22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Kawasan Konservasi)	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	17,595,000.00	1 Kawasan	-	(17,595,000)
	23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Pelabuhan Perikanan)	Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	10 Ton	29,120,000.00	10 Ton	-	(29,120,000)
	<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>102,400,000.00</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>102,400,000.00</b>	<b>-</b>
		<b>(UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang</b>	<b>100 Persen</b>		<b>100 Persen</b>		
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	1 Tahun	97,000,000.00	1 Tahun	97,000,000.00	-
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD Kawasan)	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	5,400,000.00	1 Kawasan	5,400,000.00	-

5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	495,485,856.00	1 Tahun	465,499,724.00	(29,986,132)	
	(UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut)	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, jumlah sistem manajemen mutu	12 Bulan		12 Bulan			
	(UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)	Jumlah materai yang tersedia, Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 Paket		3 Paket			
	(UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)	Persentase jumlah kelancaran sarana dan prasarana administrasi	100 Persen		100 Persen			
	(UPTD Pelabuhan Perikanan)	produksi ikan yang didaratkan dipelabuhan perikanan	10 Ton		10 Ton			
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat	1 Tahun	3,000,000.00	1 Tahun	3,000,000.00	-
	2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut)	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	510,000.00	12 Bulan	510,000.00	-
	3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)	Jumlah materai yang tersedia	150 lembar	750,000.00	150 lembar	750,000.00	-
	4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	450,000.00	1 Kawasan	450,000.00	-
	5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	1 Tahun	116,365,076.00	1 Tahun	116,365,076.00	-
	6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut)	tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	12 Bulan	115,650,000.00	12 Bulan	115,650,000.00	-
	7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)	Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Jenis	111,600,000.00	3 Jenis	91,313,868.00	(20,286,132)
	8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Kawasan Konservasi Perairan)	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	15,600,000.00	1 Kawasan	5,900,000.00	(9,700,000)
	9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Pelabuhan Perikanan)	Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	10 Ton	16,560,780.00	10 Ton	16,560,780.00	-
	10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Paket	115,000,000.00	2 Paket	115,000,000.00	-
			jumlah sistem manajemen mutu yang terpelihara	2 Paket		2 Paket		

	<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1 Tahun	<b>2,636,147,928.00</b>	1 Tahun	<b>2,516,592,916.00</b>	<b>(119,555,012)</b>
		<b>(UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut)</b>	<b>Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas, jumlah pemeliharaan gedung kantor</b>	<b>12 Bulan</b>		<b>12 Bulan</b>		
		<b>(UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)</b>	<b>Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala</b>	<b>3 Paket</b>		<b>3 Paket</b>		
		<b>(UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)</b>	<b>Persentase jumlah kendaraan dinas yang</b>	<b>100 persen</b>		<b>100 persen</b>		
		<b>(UPTD Pelabuhan Perikanan)</b>	<b>Jumlah kendaraan dinas dan gedung yang terpelihara</b>	<b>100 persen</b>		<b>100 persen</b>		
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	74,449,600.00	1 Kawasan	74,449,600.00	-
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	1 Tahun	582,322,984.00	1 Tahun	537,702,984.00	(44,620,000)
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	5 Jenis	170,650,496.00	5 Jenis	156,628,096.00	(14,022,400)
	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	3 unit	127,050,496.00	3 unit	127,050,496.00	-
	5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD	Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan	10 Ton	64,166,600.00	10 Ton	64,166,600.00	-
	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	16 unit	48,196,448.00	16 unit	45,756,448.00	(2,440,000)
	7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	691,512,416.00	1 Tahun	691,512,416.00	-
	8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut)	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor, terselenggaranya kebersihan kantor, terselenggaranya	12 bulan	341,908,588.00	12 bulan	326,917,588.00	(14,991,000)

		9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung kantor yang dipelihara	150 m2	217,382,240.00	150 m2	187,382,240.00	(30,000,000)
		10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	10 Ton	70,958,060.00	10 Ton	57,476,448.00	(13,481,612)
		11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	1 Tahun	247,550,000.00	1 Tahun	247,550,000.00	-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>			<b>Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi</b>	<b>1 Ha</b>	<b>1,766,897,524.00</b>	<b>1 Ha</b>	<b>1,540,415,124.00</b>	<b>(226,482,400)</b>
	<b>1</b>	<b><i>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i></b>		<b><i>Terlaksananya kawasan konservasi perairan yang dikelola secara</i></b>	<b><i>1 Kawasan</i></b>	<b><i>1,683,167,376.00</i></b>	<b><i>1 Kawasan</i></b>	<b><i>1,497,643,376.00</i></b>	<b><i>(185,524,000)</i></b>
		1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	1 Dokumen	122,476,448.00	1 Dokumen	44,650,648.00	(77,825,800)
		2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	5 Kawasan	100,000,000.00	5 Kawasan	4,377,800.00	(95,622,200)
		3	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	2 Kawasan	-	2 Kawasan	-	-
		4	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali)	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	1,460,690,928.00	1 Kawasan	1,448,614,928.00	(12,076,000)
	<b>2</b>	<b><i>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i></b>		Jumlah kawasan WP3K yang meningkat kualitasnya	5 Kawasan	<b><i>83,730,148.00</i></b>	5 Kawasan	<b><i>42,771,748.00</i></b>	<b><i>(40,958,400)</i></b>
		1	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pelaku usaha yang memahami izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak	5 Kawasan	83,730,148.00	40 Pelaku Usaha	42,771,748.00	(40,958,400)
	<b>3</b>	<b><i>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i></b>		Fasilitasi pendampingan peningkatan kualitas produksi petani garam	30 Orang	-	30 Orang	-	-
		1	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah fasilitasi pendampingan peningkatan kualitas produksi petani garam	30 Orang	-	30 Orang	-	-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>			<b>Jumlah produksi perikanan tangkap</b>	<b>101.082,74 Ton</b>	<b>256,839,616.00</b>	<b>101.082,74 Ton</b>	<b>183,193,216.00</b>	<b>(73,646,400)</b>

			(UPTD Pelabuhan Perikanan)	Peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di pelabuhan					
	1		<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	<i>Fasilitas Pendampingan LPMUKP (Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan)</i>	<i>8 Kabupaten</i>	<i>187,475,168.00</i>	<i>8 Kabupaten</i>	<i>145,716,768.00</i>	<i>(41,758,400)</i>
		1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Penyusunan Data dan Informasi Sumber daya Ikan	8 Kabupaten	77,475,168.00	8 Kabupaten	41,881,868.00	(35,593,300)
		2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Fasilitasi Pendamping LPMUKP	8 Orang	110,000,000.00	8 Orang	103,834,900.00	(6,165,100)
	2		<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	<i>1) Terlaksananya pelatihan cara penanganan ikan yang baik. 2) Terlaksananya pelatihan keamanan dan keselamatan nelayan</i>	<i>60 Nelayan; Nelayan</i>	<i>69,364,448.00</i>	<i>60 Nelayan; Nelayan</i>	<i>37,476,448.00</i>	<i>(31,888,000)</i>
		1	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan (UPTD Pelabuhan Perikanan)	Terlaksananya Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik	30 Nelayan	69,364,448.00	30 Nelayan	37,476,448.00	(31,888,000)
				Terlaksananya pelatihan keamanan dan keselamatan nelayan	30 Nelayan		30 Nelayan		
	4		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>18.609,02 Ton</b>	<b>4,400,079,720.00</b>	<b>18.609,02 Ton</b>	<b>4,366,671,720.00</b>	<b>(33,408,000)</b>
			(UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut)	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	284.400.000 Rupiah		284.400.000 Rupiah		
	1		<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</i>	<i>Jumlah Monitoring Kesehatan Ikan dan</i>	<i>17 Kali</i>	<i>4,400,079,720.00</i>	<i>17 Kali</i>	<i>4,366,671,720.00</i>	<i>(33,408,000)</i>
			<i>(UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut)</i>	<i>tersedianya benih, calon induk dan induk ikan air Tawar dan Payau</i>	<i>12 Bulan</i>		<i>12 Bulan</i>		
		1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut)	tersedianya benih, calon induk dan induk ikan air Tawar dan Payau	12 Bulan	1,265,926,600.00	12 Bulan	1,253,606,600.00	(12,320,000)

		2	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut)	Tersedianya calon induk, dan induk ikan air tawar	12 Bulan	3,074,677,972.00	12 Bulan	3,074,677,972.00	-
		3	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah	Jumlah monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan	17 Kali	59,475,148.00	17 Kali	38,387,148.00	(21,088,000)
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>Jumlah pelaku usaha taat Hukum</b>	<b>50 Pelaku Usaha</b>	<b>41,746,000.00</b>	<b>50 Pelaku Usaha</b>	<b>18,240,000.00</b>	<b>(23,506,000)</b>
	<b>1</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>		Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha bidang kelautan	23 Pelaku Usaha	<b>29,659,000.00</b>	23 Pelaku Usaha	<b>13,680,000.00</b>	<b>(15,979,000)</b>
		1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Bidang Kelautan Yang	13 Pelaku Usaha	19,771,000.00	13 Pelaku Usaha	9,120,000.00	(10,651,000)
		2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Bidang Kelautan Yang	8 Pelaku Usaha	7,352,200.00	8 Pelaku Usaha	3,040,000.00	(4,312,200)
		3	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Bidang Kelautan Yang diawasi	2 Pelaku Usaha	2,535,800.00	2 Pelaku Usaha	1,520,000.00	(1,015,800)
	<b>2</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang diawasi	10 Pelaku Usaha	<b>12,087,000.00</b>	10 Pelaku Usaha	<b>4,560,000.00</b>	<b>(7,527,000)</b>
		1	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang diawasi	10 Pelaku Usaha	12,087,000.00	10 Pelaku Usaha	4,560,000.00	(7,527,000)
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>			<b>Jumlah produk perikanan bersertifikat</b>	<b>149 SKP</b>	<b>459,547,378.00</b>	<b>149 SKP</b>	<b>462,842,680.00</b>	<b>3,295,302</b>
			(UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)	Jumlah hasil uji yang dikeluarkan	4900 Sample		4900 Sample		
	<b>1</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>		<b>Pembinaan Mutu dan Nilai Tambah Produk Olahan Hasil Perikanan</b>	<b>25 UPI</b>	<b>420,642,578.00</b>	<b>25 UPI</b>	<b>447,457,880.00</b>	<b>26,815,302</b>
			(UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)	Rekomendasi hasil uji produk perikanan	4900 Sample		4900 Sample		
		1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah penerima paket gemarikan	200 Paket	153,571,178.00	200 Paket	99,393,868.00	(54,177,310)

		dan pemasaran skala menengah dan besar	Pembinaan mutu dan nilai tambah produk olahan hasil perikanan	25 UPI		25 UPI		
	2	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)	Jumlah Produk Perikanan Yang Diuji	4900 Sampel	242,158,400.00	4900 Sampel	325,964,012.00	83,805,612
	3	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)	Jumlah UPI yang Disurveillance	9 UPI	24,913,000.00	9 UPI	22,100,000.00	(2,813,000)
	2	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Profil Usaha Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	100 Buku	<b>38,904,800.00</b>	100 Buku	<b>15,384,800.00</b>	<b>(23,520,000)</b>
	1	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Profil Usaha Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	100 Buku	38,904,800.00	100 Buku	15,384,800.00	(23,520,000)